



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1044/DJU/SK/HM.02.3/3/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP)
TINGKAT PUSAT DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
TAHUN 2021**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan modernisasi administrasi perkara dan keterbukaan informasi jalannya perkara bagi masyarakat pengguna;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara tepat dan berkelanjutan perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) baik di Tingkat Pusat maupun di Pengadilan Tingkat Banding;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan...

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Pekara di Pengadilan Secara Elektronik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan Dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Pekara di Pengadilan Secara Elektronik;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP) TINGKAT PUSAT DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2021.**

KESATU...

- KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini untuk menjadi anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Pusat dan dalam lampiran III sebagai Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2021.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara terdiri atas Kesekretariatan, Divisi Kajian dan Divisi Teknis Aplikasi.
- KETIGA : Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan IV surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Maret 2021

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



PRIM HARYADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial ;
3. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial ;
4. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
7. Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
8. Ketua Pengadilan di seluruh Indonesia;
9. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BADAN PERADILAN UMUM
 NOMOR : 1044/DJU/SK/HM.02.3/3/201
 TANGGAL : 10 Maret 2021

**DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS
 SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
 TINGKAT PUSAT (SATGAS SIPP PUSAT)**

NO.	N A M A	JABATAN	POSISI DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Dr. H. Prim Haryadi, SH., MH.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	Pembina
2.	Zahlisa Vitalita, SH.	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Ketua Satgas
3.	Lies Khadijah, SH., MH.	Kasubdit Bimbingan dan Monitoring	Sekretaris Satgas
KESEKRETARIATAN			
4.	Yayat Sudrajat, SH., MH.	Kasubdit Statistik dan Dokumentasi	Koordinator
5.	Leni Cahyani, SH., MH.	Kepala Seksi Sarana Pengadilan	Anggota
6.	Misra Dewita, S.H., M.H	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi	Anggota
7.	Rosalia Puspa K, SE., MH.	Kepala Seksi Tata Persidangan	Anggota
8.	Reni Kartini, S.H	Kepala Seksi Dokumentasi Wilayah Hukum	Anggota
9.	Marthinalova Noll, S.Kom	Staf Seksi Statistik	Anggota
10.	Safitri, A.Md.	Staf Seksi Tata Persidangan	Anggota
DIVISI KAJIAN			
11.	Heru Pramono, SH., MH.	Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura	Koordinator
12.	James Butar Butar, SH.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta	Anggota

13.	Agoeng Rahardjo, SH.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung	Anggota
14.	Saurasi Silalahi, SH., MH.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya	Anggota
15.	Tony Pribadi, SH., MH.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta	Anggota
16.	Sirande Palayukan, SH., M.Hum	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta	Anggota
17.	Eka Budhi Prijanta, SH., MH.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar	Anggota
18.	Harini, SH., MH.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar	Anggota
19.	Eko Aryanto, SH., MH.	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Anggota
20.	Rizkiansyah, SH.	Hakim Pengadilan Negeri Sekayu	Anggota
21.	Mustamin, SH., MH.	Hakim Pengadilan Negeri Maros	Anggota
22.	Zulfikar Berlian, SH.	Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung	Anggota
23.	Ferdian Permadi, SH.	Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah	Anggota
24.	Dirgha Zaki Azizul, SH., MH.	Hakim Pengadilan Negeri Batang	Anggota
25.	H. Adi Wahyono, SH., MH.	Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
26.	Candra S.H.	Kasubdit Tata Kelola	Anggota
27.	Achmad Basyari, SE.	Kepala Seksi Pelayanan Peradilan	Anggota
DIVISI TEKNIS APLIKASI			
31.	Jhon Hendriansyah, SH.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi	Koordinator
32.	Dona Panambayan, SH., MH.	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Martapura	Anggota
33.	Marisa Eka Putra, ST., M.Eng	Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkayang	Anggota
34.	Oktein Josepus Susak, SH., MH.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi	Anggota
35.	Roby Hidayat, S.T	Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Riau	Anggota

36.	Fransisco Palang Ama, ST.	Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Ambon	Anggota
37.	Zeno Dani Kuncoro, ST.	Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Bengkulu	Anggota
38.	Yenny Viky Effendy, ST., M.Eng	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Yogyakarta	Anggota
39.	Imam Maxudi, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Praya	Anggota
40.	Ita Masyita, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Bontang	Anggota
41.	Aris Susilo, ST.	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Madiun	Anggota
42.	Ida Bagus Swardana Putra, S.Kom, S.H	Kepala Seksi Statistik	Anggota
43.	Aditya Widyartadi, S.Kom	Staf Seksi Dokumentasi Wilayah Hukum	Anggota
44.	Oktaviandi Wahyu Nugroho, ST.	Staf Seksi Statistik	Anggota
45.	Dodon Angin Wiyono, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama Badilum	Anggota
46.	Agustinus Evan Bangun Merdhiko, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama Badilum	Anggota
47.	Bambang Andi Saputra, S.Kom	Staf Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Wonosari	Anggota
48.	Raja Muda Arief, S. Kom	Pegawai Tidak Tetap pada Pengadilan Negeri Stabat	Anggota
49.	Yusroni	Pegawai Tidak Tetap pada Pengadilan Negeri Sumber	Anggota



DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,

PRIM HARIYADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 1044/DJU/SK/HM.02.3/3/201
TANGGAL : 10 Maret 2021

**TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
TINGKAT PUSAT (SATGAS PUSAT)**

Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Pusat (SATGAS PUSAT) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kesekretariatan:

- a. Menyiapkan kebutuhan kegiatan Satuan Tugas Sistem Informasi Perkara (SATGAS SIPP);
- b. Membuat laporan kegiatan rapat koordinasi Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
- c. Menghimpun *review* atau kajian terhadap aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- d. Melakukan publikasi terhadap *Frequently Asked Question (FAQ)* pada media yang telah ditentukan;
- e. Memfasilitasi pertemuan antara anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) dengan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Satgas Sistem Informasi Penelusuran Perkara;

2. Divisi Kajian:

- a. Melakukan *review* atau kajian dan membuat rekomendasi terhadap fasilitas yang terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- b. Menerima laporan terkait implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi melalui media yang telah ditentukan;
- c. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- d. Melakukan koordinasi dengan Divisi Teknis Aplikasi untuk membuat rekomendasi kebijakan terhadap implementasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

- e. Membuat laporan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

3. Divisi Teknis Aplikasi:

- a. Menerima laporan terkait permasalahan teknis aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Pengadilan Tingkat Negeri dan Pengadilan Tinggi melalui media yang telah ditentukan;
- b. Menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan teknis dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berdasarkan laporan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
- c. Melakukan koordinasi dengan Divisi Kajian dalam membuat rekomendasi implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- d. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- e. Membuat dan mengembangkan tools/alat bantu monitoring dan evaluasi dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara untuk mendukung register elektronik;
- f. Melakukan Koordinasi dengan Divisi Kajian dalam membuat laporan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BADAN PERADILAN UMUM
 NOMOR : 1044/DJU/SK/HM.02.3/3/201
 TANGGAL : 10 Maret 2021

**DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS
 SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
 PENGADILAN TINGKAT BANDING (SATGAS SIPP PT)**

NO.	N A M A	NIP	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	YUS ENIDAR, SH., MH.	196007171988032002	Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2.	H. MAKARODA HAFAT, SH.,M.Hum.	196305301988031003	
3.	T. SAMSUL BAHRI, S. Kom	198807252015031003	
4.	SIGIT PRAMONO GINTING, A.Md.T.	199812282020121003	
5.	H. AROZIDUHU WARUWU, SH.MH	196201171988031004	Pengadilan Tinggi Medan
6.	JOHN PANTAS L TOBING, S.H., M.Hum.	195711261981031006	
7.	ROY SAMUEL FERNANDUS, S.T.	199106072015031001	
8.	PUTRI NURLELI, A.Md.	199006202015032001	
9.	INRAWALDI, S.H.,M.H.	196210211988031001	Pengadilan Tinggi Padang
10.	CEPI ISKANDAR, SH.MH	195912151988031005	
11.	MAI FITRI YADI, A.Md	198805192011011005	
12.	SHAFIRA FANNI, S.Komp.	199509132019032016	
13.	MADE SUTRISNA, SH., MHum.	196109221988031001	Pengadilan Tinggi Riau
14.	IMAN GULTOM, SH. MH	196003021985121001	
15.	MANASE SIAHAAN, A.Md., S.H.	198406132009121004	

NO.	N A M A	NIP	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	DARSONO SYARIF RIANOM, S.H.	195610241988031001	Pengadilan Tinggi Jambi
17.	R.A. SUHARNI, SH, MH	196102121986122001	
18.	RIRI INDRIATI PURBA, S.Kom	199006172015032002	
19.	ARYONO DIGDO PRABOWO, S.T.	199103092015031003	
20.	SUTAJI, SH. MH	196302231988031001	Pengadilan Tinggi Palembang
21.	Dr. YAPI, S.H., M.H.	196206161988031004	
22.	TINDA WIRANASARI, S.E., S.H.	198701312009122001	
23.	ASHARI, S.Kom.	198811292020121002	
24.	JEFERSON TARIGAN, S.H.,M.H.	196001181985031006	Pengadilan Tinggi Bengkulu
25.	WIWIK SUHARTONO, S.H., M.H.	196106191986121001	
26.	AGIEF MUFTAHID, S.Kom	199702182020121006	
27.	SUPRABOWO, SH., MH.	195905151985031005	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
28.	SUYADI, SH	196106151986121002	
29.	YOPA GUSTIAWAN, S.Kom.	198408042009121006	
30.	ISNANI KURNIA PUTRI, A.Md	199108202015032004	
31.	NATHAN LAMBE, S.H., M.H.	195612251987021001	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
32.	WINARTO, S.H.	196003251986121001	
33.	IRHANSYAH, S.Kom	198004172009121003	
34.	MOCH ROMADHON	198605122009121007	

NO.	N A M A	NIP	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
35.	HARYONO, SH., MH.	196008181985121001	Pengadilan Tinggi Jakarta
36.	H. SUGENG HIYANTO, S.H., M.H	196005031985031005	
37.	DESTIAN BIMANTORO, S.Kom	198512132011011007	
38.	SYAHRUL RAMADHAN, S.H	198605232011011009	
39.	ARNELLIA, S.H. M.H.	195703291985122001	Pengadilan Tinggi Bandung
40.	MAMAN MOHAMAD AMBARI, SH.MH	195504091986121001	
41.	SIDIK NUGRAHA, S.Kom	198604102009121002	
42.	TIA ADISTIAN PASHA, S.T.	198405272011011012	
43.	SANTUN SIMAMORA ,SH., MH.	195707091985031002	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
44.	PRASETYO IBNU ASMARA, SH.,MH	195907161985031004	
45.	TEGUH WIYONO, A.Md	198706302009121004	
46.	YUNAN WIDIATMOKO, A.Md	198810072020121003	
47.	ACHMAD YUSAK, SH. MH	195904041985031002	Pengadilan Tinggi Yogyakarta
48.	MAHMUD FAUZIE, SH, MH	195806071984031002	
49.	MARIA ANGELINA ANOM HERNINGTYAS CAHYOWATI, S.H., M.Kn	198511022011012022	
50.	MERINA KUSUMAWATI, S.H., M.H.	198604272011012013	
51.	KAREL TUPPU, SH., MH	195904071985031005	Pengadilan Tinggi Surabaya
52.	PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.H	195811121984031003	
53.	ANUGRAH NAHARI, S.KOM	198407122011011008	

NO.	N A M A	NIP	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
54.	MUHAMMAD AMIR HAMZAH, SH.	198204012011011008	Pengadilan Tinggi Surabaya
55.	RAMLI DARASAH, S.H., M. Hum.	195708161985031004	Pengadilan Tinggi Banten
56.	ENNID HASANUDDIN, S.H., C.N.,M.H.	195907101985121001	
57.	SATRIA ARI WIBOWO, A.Md	198810012009041001	
58.	PRIBADI HUTOMO PUTRO, S.KOM	-	
59.	SUHARTANTO, SH., MH.	196412081989031003	Pengadilan Tinggi Denpasar
60.	Dr. DJANIKO M.H.GIRSANG, S.H..M.Hum.	196307121988031003	
61.	I GEDE KARTIKA ARYASA, S.T	197604212009041002	
62.	I KETUT SUHARSANA, S.Kom	198201162009121001	
63.	UNGGUL AHMADI, SH., MH.	196003111986121001	Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
64.	SAPAWI, SH.MH	195707211988031001	
65.	SATRIA BUANA, A.Md	198403272011011011	
66.	SUDIRMAN, A.Md	197809172009041003	
67.	YOHANES PRIYANA, SH., MH.	196303081988031007	Pengadilan Tinggi Kupang
68.	POSMA P NAINGGOLAN, SH.,MH	195912021986121001	
69.	FEBY MARIANE MALELAK, S.Kom	198402202009042006	
70.	PUTUT SAPTOAJI MAHENDRA, A.Md.	199007272020121005	
71.	JHON HALASAN BUTAR BUTAR, SH., M.Si., MH.	196011211986121001	Pengadilan Tinggi Pontianak
72.	PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H.	196008071985122001	

NO.	N A M A	NIP	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
73.	ST NINA MAULIA, S.T.	198611192009122005	Pengadilan Tinggi Pontianak
74.	SANRIYO PARLINDUNGAN MANALU, S.E.,S.H.	198711262015031001	
75.	WAHYU PRASETYO WIBOWO, SH.MH	196305311988031003	Pengadilan Tinggi Palangkaraya
76.	ANNE RUSIANA, SH., M.HUM	196204011988032001	
77.	BANGGA CHRYSTO TARIGAN, A.Md.	199604272019031001	
78.	ROBERTO ASINTONGAN P, A.Md.	198802062019031003	
79.	MOESTOFA, S.H., M.H.	195808181985121001	Pengadilan Tinggi Banjarmasin
80.	ABDUL HALIM AMRAN, SH., MH	196212091988031001	
81.	MUHAMMAD ANDRIANSYAH, ST., SH.	198212242009121004	
82.	DEFFI QURROTI A`YUNIN ROFIK, A.Md.	199609242020122003	
83.	SUGIYANTO, S.H., M.Hum.	196109051985121001	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
84.	RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH	196103191986121001	
85.	SLAMET WALUYO, SE	198108182011011012	
86.	MAXIMILIAN MIRKA SALINDING, S.T.	199105102015031001	
87.	Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, SH., MH.	196106151988031004	Pengadilan Tinggi Manado
88.	DIDIK WURYANTO, S.H., M.Hum.	196109181988031007	
89.	RONALD YAU, ST	198505022009121003	
90.	RETZI YOSIA LEWU, ST	198203092009122002	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
91.	TITUS TANDI, S.H.,M.H.	196202021987031008	

NO.	N A M A	NIP	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
92.	GEDE ARIAWAN, SH, MH	196107201988031006	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
93.	RAHMAT SAFRIN DOMUT, S.SI	198410302009121004	
94.	ANDY YULIANSYAH, A.Md	199007292020121004	
95.	RENO LISTOWO, SH., MH	196108231986121001	Pengadilan Tinggi Makassar
96.	HARINI, SH.,MH	196012261986122001	
97.	INGGOU DAVID PURBA, S.Kom., S.H., M.H.	198807072015031002	
98.	YULI HARIANTO	-	
99.	ACH FAUZI, S.H., M.H.	196010291988031001	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
100.	AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.	196305121988031002	
101.	AKBAR, S.H.	198706132012121002	
102.	MOH SULAIMAN RISKIRULLAH, S.A.P.	199206182019031006	
103.	PUDJI WIDODO, S.H., M.H.	196204011987021002	Pengadilan Tinggi Gorontalo
104.	AAA PUTU OKA DEWI IRIANI, SH, MH	1958032602201703001	
105.	FAIZAL A.DJAU, S.SI	198605232011011008	
106.	LUTHFURROCHMAN, A.Md	199112042020121006	
107.	BUDHY HERTANTIYO, S.H., M.H.	196302061986121001	Pengadilan Tinggi Ambon
108.	Dr. EDDY PARULIAN SIREGAR, SH.MH	196211151988031003	
109.	RULLY WERINUSSA, SH	198002082014081003	
110.	JESSY MARLON NOYA, S.H.	198503232009041004	

NO.	N A M A	NIP	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
111.	DIRIS SINAMBELA, SH	195911081986121001	Pengadilan Tinggi Maluku Utara
112.	Dr JONNER MANIK, SH, MM	196012061988031004	
113.	DICKY WAHYU RAMADANI, A.Md.	198904152019031004	
114.	MAZHRUR RAHMAN KUSUMA WARDANI, A.Md.	199208122019031006	
115.	SRIYATMO JOKO SUNGKOWO, SH.	196107051987021001	Pengadilan Tinggi Jayapura
116.	ANTONIUS SIMBOLON, SH, MH.	196202081988031002	
117.	LIBENSTEIN SETLIGHT, A.Md.	198209262009121003	
118.	NUR YUWONO ADHI NUGROHO, A.Md.	199408212020121002	



DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,
PRIM HARIYADI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 1044/DJU/SK/HM.02.3/3/201
TANGGAL : 10 Maret 2021

**TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
PENGADILAN TINGKAT BANDING (SATGAS PT)**

Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding (SATGAS PT) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memfasilitasi kebutuhan yang terkait dengan kegiatan Satgas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding;
2. Menerima laporan terkait permasalahan teknis aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
3. Menerima laporan terkait implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
4. Menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan teknis dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
5. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
6. Melakukan rapat koordinasi Satgas SIPP Pengadilan Tingkat Banding minimal 1 kali dalam setahun.
7. Membuat laporan implementasi, permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
8. Melakukan koordinasi dengan Satgas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Badan Peradilan Umum.
9. Memonitor kesiapan Pengadilan Negeri untuk penerapan register elektronik;